

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Makassar; Hasanuddin.
- A'an Efendi, Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Medpress Digital.
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Eri Yulikhsan. 2016. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Yogyakarta; Deepublish.
- Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Rangkang Education.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta; Kencana.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2017. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta; Gajah mada University Press.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sukarno Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar; Arus Timur.
- Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta; Kencana.
2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta Sinar Grafika.



Disertasi :

Yodi Martono Wahyunadi. 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta.

Skripsi:

Muhammad Yasin Syafruddin. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Menerima Hasil Pemilihan Yang Diusulkan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Studi Kasus: Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal:

Galang Asmara. "Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum". *Jurnal Diskresi*. Universitas Mataram. Volume 1 Nomor 1. 2022.

Lutfil Ansori. "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah". *Jurnal Yuridis*. Universitas Pembangunan Nasional (Veteran). Volume 2 Nomor 1. 2015.

Mhd Taufiqurrahman. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan". *Jurnal Retentum*. Universitas Darma Agung. Volume 1 Nomor 1. 2019.

Peraturan Perundang- Undangan:

·Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

·Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Putusan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

Internet:

Katharina, 2019, "Akses Internet Masih di Blokir Warga Jayapura Gunakan WiFi". <https://kumparan.com/bumi-papua/akses-internet-masih-diblokir-warga-jayapura-gunakan-wifi-1rnzr4F7GdU/full>

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2019. *Perlambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787>

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2019. *Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821>

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. Profil. <https://www.kominfo.go.id/profil>



man Republik Indonesia, 2019, "Pro Kontra Pembatasan Internet di Papua: Ombudsman Minta Evaluasi, Pemerintah Menilai demi Kebaikan" <https://ombudsman.go.id/news/r/pro-kontra-pembatasan-internet-di-papua-ombudsman-minta-evaluasi-pemerintah-menilai-demi-kebaikan>

Syaiful Hakim, 2019, "*Pemulihan Akses Internet di Papua Untuk Kontra Opini Propaganda Asing*". <https://www.antaraneews.com/berita/1031918/pemulihan-akses-internet-di-papua-untuk-kontra-opini-propaganda-asing>

